KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kinerja DPR: Perlu Kontrol Rakyat Cegah Pragmatisme
Tanggal : Kamis, 18 September 2014
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

KINERJA DPR

Perlu Kontrol Rakyat Cegah Pragmatisme

JAKARTA, KOMPAS — Kelompok masyarakat sipil diharapkan lebih aktif mengawal kinerja DPR, terutama saat mereka menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Hal itu diperlukan untuk mencegah legislatif menggunakan kekuasaannya demi kepentingan pragmatis partai politik yang berbeda dengan aspirasi publik.

Demikian salah satu gagasan dalam lokakarya "Fungsi Pengawasan Legislatif" yang digelar Pusat Kajian Politik (Puskapol) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), di Jakarta, Rabu (17/9).

Hadir, antara lain, Direktur Puskapol UI Sri Budi Eko Wardani; peneliti Puskapol, Yolanda; Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR sekaligus anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Gerindra, Sumarjati Arjoso; anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Poempida Hidayatullah, peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Tommy A Legowo; peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Firman Noor; peneliti Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan; serta peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Ronald Rofiandri.

Tommy A Legowo menilai, pengawasan merupakan fungsi penting DPR untuk mendorong kinerja pemerintah yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Namun, pada pelaksanaannya, pengawasan legislatif sering menyimpang akibat pengaruh fraksi yang merupakan kepanjangan tangan partai politik. Setiap partai memiliki program dan kepentingan politik sendiri. "Ada juga pengaruh koalisi. Meski tak disebutkan dalam undang-undang, faktanya kekuatan koalisi sangat berpengaruh pada konstelasi DPR," katanya.

Menurut Abdullah Dahlan, idealnya setiap anggota DPR punya otonomi sebagai pengawas pemerintah. Namun, kenyataannya, mereka dikerangkeng dalam sikap fraksi dan sulit berseberangan dengan fraksinya. Jika berbeda pendapat, mereka terancam dipecat sebagai anggota DPR. "Sebaiknya, setiap fraksi memberikan keleluasaan bagi anggotanya bersikap berbeda dalam isu-isu penting. Dengan begitu, anggota legislatif lebih otonom dan bisa selalu kritis," ujarnya.

Yolanda, yang menjelaskan kajian Puskapol, menyebutkan, saat ini semakin tumbuh kelompok masyarakat sipil yang berpotensi menjadi kekuatan ekstra parlementer. Selama Pemilu Presiden 2014, mereka mengorganisasi diri dalam organisasi relawan yang mendorong kampanye sehat dan kreatif serta mengawasi rekapitulasi suara hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum. Seusai pemilu, sebagian dari mereka mengkritisi kinerja DPR dalam membuat undang-undang, seperti revisi Rancangan Undang-Undang Pilkada. (IAM)